



LAPORAN

**KUNJUNGAN KERJA PANITIA KERJA
UJI KOMPETENSI DAN PENEMPATAN DOKTER
KOMISI IX DPR RI**

**PROVINSI JAWA TIMUR
Tanggal, 23-25 MARET 2011**

**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2011**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANITIA KERJA
UJI KOMPETENSI DAN PENEMPATAN DOKTER
KOMISI IX DPR RI
PROVINSI JAWA TIMUR
23 - 25 MARET 2011**

=====

I. PENDAHULUAN

Pada masa persidangan III Tahun Sidang 2010 – 2011, Panja Uji Kompetensi dan Penempatan Dokter Komisi IX DPR RI mengadakan Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan pada tanggal 23-25 Maret 2011. Dalam kunjungan kerja tersebut, Panja berkesempatan untuk berdiskusi dengan Bupati Bangkalan, Rektor Universitas Airlangga, Rektor Universitas Hang Tuah, Direktur Umum RS Soetomo, Kepala Rumah Sakit TNI AL Dr. Ramelan, Ketua Ikatan Dokter Indonesia wilayah Jawa Timur, Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan. Panja juga berkesempatan untuk mengunjungi fasilitas Hyperbaric Oxygen Therapy Center di Lembaga Kesehatan Laut RSAL DR Ramelan dan Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Ratu Bangkalan.

Tujuan utama diadakannya kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur adalah untuk mendapatkan gambaran nyata tentang sistem pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran, mendapatkan data mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi Kedokteran Indonesia (UKDI) dan untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan program *internship* yang dilakukan oleh Pemerintah.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi yang memiliki jumlah Fakultas Kedokteran terbanyak, tercatat ada 7 (tujuh) buah Fakultas Kedokteran dengan berbagai macam tingkat akreditasi. Untuk melihat secara langsung bagaimana sistem pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran yang terdapat di Provinsi Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, maka Tim Kunker Panja Uji Kompetensi dan Penempatan Dokter berkunjung ke Universitas Airlangga dan Universitas Hang Tuah.

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Sesuai kesimpulan Rapat Panja Uji Kompetensi dan Penempatan Tenaga Dokter tanggal 14 Maret 2011.

B. WAKTU PELAKSANAAN

Kunjungan Kerja Panja Uji Kompetensi dan Penempatan Dokter Komisi IX DPR RI ke Provinsi Jawa Timur dilaksanakan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Maret 2011.

C. SUSUNAN TIM

Susunan Tim Kunjungan Kerja Panja Uji Kompetensi dan Penempatan Dokter Komisi IX DPR RI ke Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut.

No.	No. AGT	N A M A	FRAKSI	KET
1	547	dr. Ahmad Nizar Shihab, SpAn	PD	Ketua Tim
2	471	Prof. Dr. dr. A. Dina Jani H. Mahdi, SpPD, KAI, SPKL, FINASIM, SH	PD	Anggota
3	490	Siti Mufattahah, Psi	PD	Anggota
4	202	H. Mamat Rahayu Abdullah	PG	Anggota
5	327	Ir. Rudianto Tjen	PDI-P	Anggota
6	330	Itet Tridjajati Sumarijanto, MRA, SS, MBA	PDIP	Anggota
7	397	dr. Karolin Margret Natasa	PDIP	Anggota
8	65	Ir. Arif Minardi	PKS	Anggota
9	136	Hang Ali Saputra Syah Pahan	PAN	Anggota
10	151	Hj. Gitalis Dwi Natarina	PKB	Anggota

D. KEGIATAN SELAMA KUNKER

1. Pertemuan dengan Dinkes Provinsi Jawa Timur, Rektor Universitas Airlangga, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jawa Timur, Direktur Umum RS Soetomo:

Dilaksanakan pada tanggal 23 Maret pukul 09.00 - 14.00, di dalam pertemuan tersebut Dinkes Provinsi Jawa Timur dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga menyampaikan presentasi yang diteruskan dengan diskusi dengan anggota Panja.

2. Pertemuan dengan Rektor Universitas Hang Tuah, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah dan Karumkital RS Dr. Ramelan

Dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2011 pukul 14.30-17.00, di dalam kunjungan tersebut, selain berdiskusi dengan rektor, dekan, karumkital dan jajaran direksi RSAL

Dr. Ramelan, para anggota Panja juga berkesempatan untuk meninjau fasilitas Hyperbaric Oxygen Therapy Center di Lembaga Kesehatan Laut RSAL DR Ramelan.

3. Kunjungan ke RSUD Syarifah Ambami Ratu Bangkalan

Dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2011 pukul 09.00 – 11.30, di dalam kunjungan tersebut, para anggota Panja melihat langsung fasilitas di RSUD Syarifah Ambami Ratu dan kemudian dilanjutkan dengan dialog dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan.

4. Pertemuan dengan Bupati Bangkalan.

Dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2011 pukul 12.00 – 14.00, di dalam kunjungan tersebut, anggota Panja berdiskusi dengan Bapak Bupati Bangkalan.

II. LAPORAN KEGIATAN SELAMA KUNJUNGAN KERJA

A. Pertemuan dengan Dinkes Provinsi Jawa Timur, Rektor Universitas Airlangga, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jawa Timur, Direktur Umum RS Soetomo

Paparan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK-UNAIR) diresmikan oleh Ir. Soekarno, Presiden I Republik Indonesia, pada tahun 1954. Setelah sebelumnya pada tahun 1943, pemerintahan pendudukan Jepang mendirikan Sekolah Kedokteran Surabaya (Ika Daigaku) yang kemudian diambil alih oleh pemerintahan Indonesia segera setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.

FK-UNAIR adalah salah satu Fakultas Kedokteran tertua di Indonesia yang telah mendapatkan akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Saat ini FK-UNAIR mempunyai sekitar 29 departemen dengan 35 program pendidikan (Prodi). FK-UNAIR memiliki berbagai fasilitas utama di antaranya RS Pendidikan Utama Unair dan kerjasama dengan RS Soetomo yang memiliki fasilitas seperti Gedung Pusat Bedah Terpadu (GPBT), Pusat Diabetes dan Nutrisi, *kidney center* serta *heart center*.

FK-UNAIR telah meluluskan sekitar 8.684 orang dokter yang tersebar di seluruh dunia. FK-UNAIR setiap tahunnya memerlukan biaya operasional sekitar Rp. 50 Milyar dan mendapatkan bantuan subsidi dari pemerintah pusat sekitar Rp. 16 Milyar. Saat ini FK-UNAIR berencana untuk membangun gedung perkuliahan dengan biaya mencapai Rp. 246 Milyar.

Atas pertanyaan tertulis Panja Uji Kompetensi dan Penempatan Dokter Komisi IX DPR RI, dekan FK-UNAIR menyampaikan jawaban sebagai berikut:

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Daya Tampung	- Pend. Dokter = 250 mhs/thn - PPDS = 350 mhs/thn
2	Program Pendidikan (Prodi)	Total 35 Prodi, dengan perincian: - D 3 (4 Prodi) = 150 mhs/thn - S 1 Dokter = 250 mhs/thn - S 1 Bidan = 100 mhs/thn - S 2 (5 Prodi) = 50 mhs/thn - PPDS 1 (24 Prodi) = 350 mhs/thn
3	Rata-rata lulusan	220 dokter/tahun
4	Program Wajib Kerja	- Sebelum 2005 tidak ada - Setelah 2005 dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), ada program internship selama 1 tahun.
5	Sarana dan Prasarana	- Preklinik Sarana cukup, namun memerlukan modernisasi peralatan sesuai dengan perkembangan teknologi. - Klinik Terutama di RS Soetomo dengan dukungan dari Pemprov Jawa Timur.
6	Biaya Pendidikan Dokter	- Jalur Nasional Uang masuk = NOL Uang SPP = Rp. 1.250.000/semester - Jalur Mandiri Uang masuk = Rp. 150.000.000 Uang SPP = Rp. 5.000.000/semester - PPDS 1 Uang masuk = NOL s/d Rp. 60 juta Uang SPP = Rp. 3.000.000/semester
7	Prosentase lulusan UKDI first taker	Di atas 95%
8	Prosentase lulusan UKDI second taker	100%

9	Rasio dosen : mahasiswa	1:7
---	-------------------------	-----

Dari diskusi antara anggota tim kunker Panja Uji Kompetensi dan Penempatan Dokter Komisi IX dengan sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, jajaran dekanat FK-UNAIR, direktur RS Soetomo dan Ketua Ikatan Dokter Indonesia wilayah Jawa Timur dan perwakilan mahasiswa diperoleh beberapa masukan sebagai berikut:

1. Walaupun lulusannya telah terbukti berkualitas, namun FK-UNAIR memandang UKDI perlu untuk tetap dipertahankan. Hal ini disebabkan karena saat ini ada 76 Fakultas Kedokteran dengan tingkat akreditasi yang beragam dengan jenjang kualitas yang sangat lebar. UKDI dapat menjadi salah satu tolok ukur penjaminan mutu lulusan dari Fakultas Kedokteran.
2. Dalam 2 kali UKDI terakhir (gelombang 12 dan 13), penyelenggaraannya dilakukan sebelum pengucapan sumpah dokter. Hal ini untuk memastikan bahwa seorang dokter yang telah bersumpah dapat langsung bekerja melayani masyarakat, selain itu untuk memastikan bahwa apabila ada seorang mahasiswa yang tidak/belum lulus UKDI, dia tetap berada di bawah tanggungjawab Fakultas Kedokteran yang bersangkutan.
3. FK-UNAIR tetap mengawasi dan membina mahasiswa UNAIR yang belum lulus UKDI, termasuk juga membantu melakukan pendampingan bagi mahasiswa dari universitas lain yang belum lulus UKDI.
4. Provinsi Jawa Timur telah mulai melakukan program internship bagi dokter muda, pengiriman gelombang pertama program tersebut dilakukan pada bulan Januari 2011 dengan memberangkatkan 150 orang dokter. Internship adalah proses pemantapan terhadap dokter yang sudah lulus. Mereka akan belajar untuk mandiri dengan melakukan intership 4 bulan di Puskesmas dan 8 bulan di RS
5. Penempatan dokter memang merupakan masalah yang rumit karena tidak ada peraturan tentang pendistribusian tenaga dokter, terlebih lagi karena biaya pendidikan yang mahal, sebagian besar dokter enggan untuk ditempatkan di daerah terpencil. Diusulkan untuk masa yang akan datang, penempatan dokter dilakukan dengan Intruksi Presiden (Inpres).
6. Demi mempertahankan mutu lulusan, FK-UNAIR tidak bersedia untuk menambah jumlah kapasitas penerimaan mahasiswa setiap tahunnya, selama belum ada penambahan tenaga dosen.

7. Perwakilan mahasiswa FK-UNAIR mengusulkan agar UKDI tidak dijadikan satu-satunya tolak ukur kelulusan, bisa melalui cara lain, misalnya praktek kerja di lapangan.
8. Bagi dokter yang mengucapkan sumpah dokter sebelum bulan April 2007 (sebelum UKDI), tidak perlu mengikuti program UKDI, tapi melakukan registrasi ulang untuk memperoleh sertifikat kompetensi melalui program P2KB (Pengembangan dan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan).

**B. Pertemuan dengan Rektor Universitas Hang Tuah,
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah dan
Karumkital Dr. Ramelan**

Paparan Karumkital Dr. Ramelan

Rumah Sakit TNI Angkatan Laut (Rumkital) Dr. Ramelan berdiri pada tanggal 7 Agustus 1950. Merupakan rumah sakit tingkat I TNI untuk wilayah timur yang menjadi rujukan bagi prajurit TNI AL, AD dan AU. Rumkital Dr. Ramelan tidak hanya melayani para prajurit TNI yang masih aktif, namun juga purnawirawan, masyarakat umum, peserta Askes non TNI hingga pasien Jamkesmas.

Sesuai dengan visinya untuk menjadi rumah sakit pilihan utama bagi TNI dan masyarakat, Rumkital Dr. Ramelan memiliki jumlah personal sebesar 1.767 orang, terdiri dari 132 orang tenaga medis (dokter umum 22 orang, dokter spesialis 79 orang, dokter gigi 10 orang, dokter gigi spesialis 11 orang dan apoteker 10 orang), 832 orang tenaga paramedis dan 713 orang tenaga non medis.

Rumkital Dr. Ramelan mempunyai 41 poliklinik dan 638 tempat tidur dengan tingkat BOR 60.72%. Pada tahun 2010, Rumkital Dr Ramelan menerima 321.715 pasien rawat inap dan rata-rata per hari menerima 1.644 pasien rawat jalan dan 120 orang pasien UGD.

Rumkital Dr. Ramelan, bekerjasama dengan FK Universitas Hang Tuah, mempunyai berbagai program pendidikan dan pelatihan bagi mahasiswa kedokteran umum, mahasiswa kedokteran gigi, pendidikan dokter spesialis, mahasiswa farmasi S1 dan S2, keperawatan, analisa medis, elektromedis, fisioterapi dan berbagai pelatihan.

Rumkital Dr. Ramelan mempunyai Lembaga Kesehatan TNI AL (Lakesla) yang berdiri sejak tahun 1968 dan dulunya bernama Lemkesla. Lakesla telah berkerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi Negeri, di antaranya dengan FK Universitas Indonesia dalam program setara PPDS yaitu Spesialis Kedokteran Hiperbarik (8 semester) dan dengan FK-UNAIR dalam program setara magister (S2) selama 4 semester.

Paparan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah

Atas pertanyaan tertulis Panja Uji Kompetensi dan Penempatan Tenaga Dokter Komisi IX DPR RI, dekan FK-UHT menyampaikan jawaban sebagai berikut:

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Daya Tampung	- Program Studi Pendidikan Kedokteran = 1.000 orang - PPDS - 1 = belum ada
2	Rincian jumlah mahasiswa	- Prodi kedokteran = 630 orang - Prodi profesi = 471 orang
3	Rata-rata lulusan	148 dokter/tahun
4	Program Wajib Kerja	Setiap dokter lulusan FK Universitas berkewajiban mengikuti regulasi wajib kerja Sarjana yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI (PTT) atas Kementerian Pertahanan RI (Pamilsuk)
5	Biaya Pendidikan Dokter	Uang masuk = Rp. 45.000.000,- Uang SPP = Rp. 10.000.000/tahun Uang Praktikum = Rp. 5 juta/tahun Uang Ujian = Rp. 1.000.000/tahun
6	Prosentase lulusan UKDI first taker	Sekitar 90-91%
7	Jumlah mahasiswa belum lulus UKDI	28 orang

C. Kunjungan ke RSUD Syarifah Ambami Ratu Bangkalan

RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu (Syamrabu) Bangkalan adalah rumah sakit kelas B non pendidikan dengan Surat Keputusan Menkes RI No. 922/Menkes/SK.VI/2005 tertanggal 27 Juni 2005 milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan berstatus Badan Layanan Umum Daerah bertahap dan dalam proses pengajuan penilaian BLUD penuh.

RSUD Syamrabu memiliki 170 buah tempat tidur dengan lahan 25.000 M² dan luas bangunan 8077 M².

Saat ini, RSUD Syamrabu mempunyai kekuatan ketenagaan SDM sebesar 370 orang terdiri dari tenaga medis 43 orang (dokter umum 22 orang, dokter gigi 5 orang dan dokter spesialis 11 orang), paramedis perawatan 181 orang, paramedis non perawatan 31 orang dan paramedis non medis 115 orang.

Pada tahun 2010, RSUD Syamrabu merawat 7132 pasien dengan tingkat BOR sebesar 41.67%. Jumlah kunjungan rawat jalan sebanyak 32.685 pasien yang tersebar dalam 13 poliklinik. Tingkat kunjungan IGD RSUD Syamrabu pada tahun 2010 adalah sebesar 8.341 orang.

Rencana kegiatan RSUD Syamrabu pada tahun 2011 antara lain adalah mengajukan izin sebagai RS jejaring, sehingga diharapkan program PPDS dapat dilaksanakan di RSUD Syamrabu. Selain itu, RSUD Syamrabu juga merencanakan untuk menjadi *teaching hospital* dengan mahasiswa praktek Universitas Hang Tuah Surabaya, Universitas Trunojoyo Bangkalan, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, STIKES Bangkalan, AKBID Bangkalan, AKBID Ngudia Husada Bangkalan dan POLTEKES.

Dalam kunjungan ke RSUD Syamrabu, Tim Kunker Panja juga berkesempatan untuk berdiskusi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, dalam paparannya, Kepala Dinas menyampaikan data sebagai berikut:

Sarana Kesehatan di Kabupaten Bangkalan

No	Jenis Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit Umum	1
2	Rumah Sakit Khusus Bersalin	1

3	Puskesmas Perawatan	21
4	Puskesmas Non Perawatan	1
5	Puskesmas Keliling	27
6	Puskesmas Pembantu	70
7	Polindes/Poskesdes	281
8	Posyandu	1050
9	Apotek	20
10	Toko Obat	13

Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bangkalan

No.	Jenis Tenaga Kesehatan	Jumlah	Standar Pemenuhan (per 100.000 penduduk)	Kebutuhan
1	Dokter Spesialis	13	6	15
2	Dokter Umum	68	40	321
3	Dokter Gigi	22	11	85
4	Perawat	485	117	653
5	Bidan	414	100	559

Dalam kesempatan dialog antara anggota tim kunker Panja dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, didapat masukan permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya tenaga medis (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi) dan tenaga paramedis (perawat dan bidan) di tiap-tiap Puskesmas yang mampu memberikan pelayanan kesehatan lebih dekat, lebih cepat dan lebih berkualitas kepada masyarakat.
2. Kabupaten Bangkalan tidak mendapatkan jatah untuk program internship Kementerian Kesehatan gelombang I yang telah dimulai pada bulan Januari 2011, diharapkan pada program internship gelombang II, Kabupaten Bangkalan bisa mendapatkan jatah.
3. Belum ada insentif khusus dari Pemerintah Kabupaten bagi dokter yang mau bekerja di Kabupaten Bangkalan.

D. Pertemuan dengan Bupati Bangkalan.

Pertemuan dengan Bupati Bangkalan, Bapak Fuad Amin, diisi dengan ramah tamah dan santap siang bersama.

III. HASIL TEMUAN PENTING TERKAIT TUGAS PANJA SISTEM PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN SISTEM RUJUKAN

Sebagaimana tujuan utama dari diadakannya Kunjungan Kerja Panja Uji Kompetensi dan Penempatan Dokter ke Provinsi Jawa Timur adalah untuk untuk mendapatkan gambaran nyata tentang sistem pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran, mendapatkan data mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi Kedokteran Indonesia (UKDI) dan untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan program *internship* yang dilakukan oleh Pemerintah, maka berikut ini adalah temuan-temuan penting yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi Panja Uji Kompetensi dan Penempatan Dokter sebagai landasan Pemerintah untuk meningkatkan sistem penjaminan mutu (*quality assurance*) dan kendali mutu (*quality control*) profesi kedokteran, serta sistem distribusi dokter di Indonesia.

1. Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) masih tetap diperlukan, mengingat ada sekitar 78 Fakultas Kedokteran di seluruh Indonesia dengan rentang kualitas yang sangat lebar. Sampai saat ini baru 16 Fakultas Kedokteran yang mendapatkan akreditasi A.
2. Tingkat kelulusan UKDI bagi mahasiswa lulusan FK Universitas Airlangga (akreditasi A) adalah sekitar 95% dan untuk mahasiswa lulusan FK Universitas Hang Tuah (akreditasi B) adalah sekitar 91%
3. Dalam 2 kali UKDI terakhir (gelombang 12 dan 13), penyelenggaraannya dilakukan sebelum pengucapan sumpah dokter. Hal ini untuk memastikan bahwa seorang dokter yang telah bersumpah dapat langsung bekerja melayani masyarakat, selain itu untuk memastikan bahwa apabila ada seorang mahasiswa yang tidak/belum lulus UKDI, dia tetap berada di bawah tanggungjawab Fakultas Kedokteran yang bersangkutan.
4. Baik FK Unair maupun FK Hang Tuah tetap membantu mengawasi dan membina mahasiswa dari universitas tersebut yang belum lulus UKDI, khusus untuk FK Unair

- juga melakukan pendampingan bagi mahasiswa dari universitas lain yang belum lulus UKDI.
5. Bagi dokter yang mengucapkan sumpah dokter sebelum bulan April 2007 (sebelum UKDI), tidak perlu mengikuti program UKDI, tapi melakukan registrasi ulang untuk memperoleh sertifikat kompetensi melalui program P2KB (Pengembangan dan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan).
 6. Biaya pendidikan bagi seorang calon dokter sangat besar. Di mana uang pangkal untuk mahasiswa FK Unair mencapai Rp. 150.000.00,- dan untuk mahasiswa FK UHT mencapai Rp. 117.000.000,-
 7. Daya tampung mahasiswa Fakultas Kedokteran sangat tergantung pada ketersediaan jumlah dosen. Oleh karena itu perlu dipikirkan bersama dengan pemerintah untuk menambah jumlah tenaga dosen fakultas kedokteran.
 8. Provinsi Jawa Timur telah mulai melakukan program internship bagi dokter muda, pengiriman gelombang pertama program tersebut dilakukan pada bulan Januari 2011 dengan memberangkatkan 150 orang dokter. Internship adalah proses pemantapan terhadap dokter yang sudah lulus. Mereka akan belajar untuk mandiri dengan melakukan intership 4 bulan di Puskesmas dan 8 bulan di RS
 9. Penempatan dokter memang merupakan masalah yang rumit karena tidak ada peraturan tentang pendistribusian tenaga dokter, terlebih lagi karena biaya pendidikan yang mahal, sebagian besar dokter enggan untuk ditempatkan di daerah terpencil. Diusulkan untuk masa yang akan datang, penempatan dokter dilakukan dengan Intruksi Presiden (Inpres).
 10. Sampai saat ini, Provinsi Jawa Timur belum mempunyai peraturan daerah, baik yang mengatur mengenai pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan, insentif daerah untuk dokter maupun beasiswa bagi mahasiswa kedokteran.

IV. PENUTUP

Demikian laporan kunjungan kerja Panja Uji Kompetensi dan Penempatan Dokter ke Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan

mulai tanggal 23 sampai 25 Maret 2011. Semoga laporan ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti dalam penyusunan rekomendasi Panja Uji Kompetensi dan Penempatan Dokter Komisi IX DPR RI yang dapat menjadi landasan bagi Pemerintah untuk meningkatkan sistem penjaminan mutu (*quality assurance*) dan kendali mutu (*quality control*) profesi kedokteran, serta sistem distribusi dokter di Indonesia.

Atas segala bantuan dan kerjasama yang baik dari mitra kerja Komisi IX DPR RI, Pihak Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, Rektor Universitas Airlangga, Rektor Universitas Hang Tuah, RSUD Soetomo, Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu Bangkalan yang telah membantu kelancaran selama Kunjungan Kerja Tim Panja Uji Kompetensi dan Penempatan Dokter, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Maret 2010

TIM KUNJUNGAN KERJA

**PANJA UJI KOMPETENSI DAN PENEMPATAN DOKTER
KOMISI IX DPR RI KE PROVINSI JAWA TIMUR**

KETUA,



dr. A. Nizar Shihab, SpAn

A - 547